

Analisis Pengeluaran Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah

Ruhu Asfarina¹⁾, Wa Asrida^{2)*}, Julie Theresya Pelamonia³⁾

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Ambon
wa_asrida80@yahoo.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the budget realization report for the Haruru Village Government in order to increase expenditure realization in the following year. This research is quantitative research. The data used in the analysis is the 2020-2023 Expenditure Budget Realization Report. The analysis technique used is documentation and is analyzed using expenditure variance analysis, expenditure harmony and expenditure efficiency. The results of the research show that expenditure in the Haruru Village Government, seen from the expenditure variance, is generally said to be good because this analysis is categorized as a favorable variance, meaning that the realization is smaller than the budget. Because only a small portion of the funds are allocated for capital expenditures and another portion is allocated for operational expenditures, the analysis of expenditure compatibility is considered unbalanced. In addition, overall expenditure efficiency checks have been carried out well and are considered effective.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran pengeluaran pada Pemerintah Desa Haruru agar dapat meningkatkan realisasi pengeluaran ditahun berikutnya. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam menganalisis adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2020-2023. Teknik analisis yang digunakan berupa dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis varians pengeluaran, keserasian pengeluaran dan efisiensi pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pada Pemerintah Desa Haruru dilihat dari varians pengeluaran secara umum dikatakan baik karena analisis ini dikategorikan varians selisih disukai (*favorable variance*) artinya realisasi lebih kecil dari pada anggaran. Karena hanya sebagian kecil dana yang disisihkan untuk pengeluaran modal dan sebagian lagi dialokasikan untuk pengeluaran operasional, maka analisis keserasian pengeluaran dinilai tidak seimbang. Selain itu, pemeriksaan efisiensi pengeluaran secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik dan dinilai efektif.

Kata kunci: *variens pengeluaran; keserasian pengeluaran; efesiensi pengeluaran*

1. PENDAHULUAN

Salah satu unsur pendorong pertumbuhan ekonomi desa adalah pengeluaran desa, yang disebut belanja desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa telah lama menjadi tolok ukur pembangunan Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pemerintah yang semakin besar maka akuntabilitas yang lebih baik diperlukan karena semakin banyak uang publik yang dikelola.

Pemerintah Desa kesulitan mengalokasikan dana pada organisasi sektor publik. Seluruh jumlah uang yang dialokasikan untuk setiap program disebut alokasi anggaran. Mengingat keterbatasan sumber dayanya, Pemerintah Desa harus dapat menggunakan uang yang diterimanya untuk mendanai proyek-proyek desa yang bermanfaat.

Desa Haruru merupakan salah satu Desa adat yang berada di Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Desa Haruru menerima Anggaran Dana Desa (ADD). Besarnya anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran Pemerintah Desa Haruru dalam Laporan Realisasi Anggaran Pengeluaran

menggambarkan bahwa selama tahun 2020-2023, anggaran pengeluaran maupun realisasi pengeluaran Pemerintah Desa Haruru mengalami fluktuasi. Selain itu, laporan tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang direncanakan setiap tahunnya tidak terealisasi sepenuhnya atau dapat disebut juga bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Desa Haruru tidak teralisasi dengan maksimal.

Data Laporan Realisasi Anggaran mungkin berguna dalam menilai pengeluaran aktual untuk tahun mendatang. Untuk mengetahui sejauh mana penghematan anggaran dan belanja riil yang dilakukan Pemerintah Desa Haruru, maka diperlukan analisis pengeluaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengeluaran Dana Desa pada Pemerintah Desa Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tahun 2020-2023.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengeluaran Desa

Menurut pasal 15 Permendagri 20 Tahun 2018, pengeluaran desa adalah segala pengeluaran yang wajib dikeluarkan oleh desa dalam satu tahun

anggaran dan untuk itu tidak dapat dimintakan penggantiannya kepada desa.

Klasifikasi Pengeluaran Desa

Pasal 16 Permendagri 20 Tahun 2018 menyebutkan pengeluaran dikategorikan dalam lima bidang, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanganan keadaan darurat, permasalahan mendesak, dan bencana.

Jenis-Jenis Pengeluaran Desa

Menurut pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengeluaran desa ada lima kategori, yaitu pengeluaran modal, pengeluaran tak terduga, pengeluaran pegawai, pengeluaran barang dan jasa, dan pengeluaran operasional.

Pengertian Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa anggaran berfungsi sebagai alat kebijakan, pengelolaan, dan akuntabilitas perekonomian. Menurut Halim dan Iqbal (2019:138), anggaran adalah suatu rencana kerja yang di satu sisi memuat jumlah pengeluaran maksimum yang mungkin diperlukan untuk mendanai kepentingan Negara di masa depan, dan di sisi lain, perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin wajar pada saat itu. Anggaran dapat juga diartikan sebagai kegiatan pemerintah yang diwujudkan dalam rupiah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

Anggaran memiliki beberapa tujuan, termasuk menetapkan jumlah pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, mengesahkan pengeluaran di masa depan, menetapkan metrik standar untuk evaluasi kinerja, menginspirasi karyawan, dan mengkoordinasikan kegiatan berbagai unit kerja (Halim dan Iqbal, 2019:138).

Manfaat Anggaran

Salah satu manfaat anggaran menurut Nafarin (2018:19) adalah segala upaya dapat menghasilkan tercapainya tujuan bersama. Selain itu, anggaran juga berfungsi sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan karyawan.
2. Memiliki kemampuan menginspirasi pekerja.
3. Memberikan tanggung jawab khusus kepada pekerja.
4. Hindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak berguna.
5. Tenaga kerja, peralatan, dan sumber daya keuangan digunakan seefektif mungkin.
6. Sumber daya pendidikan manajerial.

Tujuan Anggaran

Tujuan pembuatan anggaran adalah sebagai berikut, menurut Nafarin (2018:19):

1. Sebagai landasan hukum formal dalam memilih sumber dan mengalokasikan kas.
2. Batasi jumlah uang yang dapat diperoleh dan dibelanjakan.
3. Untuk memudahkan pengawasan, sebutkan jenis dana investasi dan sumber dana yang dicari.
4. Untuk mendapatkan hasil terbaik, rasionalkan sumber dan investasi keuangan.
5. Menyempurnakan rencana yang dikembangkan agar anggaran menjadi lebih jelas dan mudah dipahami.
6. Mempertimbangkan, mengevaluasi, dan mengambil keputusan terhadap setiap proposal keuangan.

Pengertian Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan pada awal periode dengan jumlah realisasi pada akhir periode. LRA membandingkan anggaran dengan pelaksanaannya dalam suatu periode keuangan dan menjelaskan sumber, alokasi, dan penggunaan dana. Bagian-bagian yang membentuk LRA adalah pengeluaran, transfer, pendanaan, pendapatan LRA, dll (Amelia dkk, 2023)

Dengan kata lain, laporan realisasi anggaran merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah yang merinci anggaran dan realisasi organisasi pelapor. Dimungkinkan untuk membandingkan anggaran dan realisasi dengan menggunakan informasi ini. Perbandingan ini menunjukkan sejauh mana tujuan yang diamanatkan secara hukum telah tercapai. Operasi keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan kepatuhan terhadap APBN atau APBD diungkapkan dalam laporan realisasi anggaran.

Nordiawan (2010:122) menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan ringkasan mengenai sumber, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya keuangan yang dikuasai pemerintah pusat atau daerah untuk satu periode pelaporan.

Sebaliknya Laporan Realisasi Anggaran menurut Rudianto (2009:18) merupakan rencana kegiatan keuangan yang memuat perkiraan usulan pengeluaran untuk waktu tertentu serta usulan aliran pendapatan untuk mendukung pengeluaran tersebut.

Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PSAP Nomor 02 yang menjadi dasar Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan anggaran untuk satu periode. Struktur Laporan Realisasi Anggaran memberikan

informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan transfer.

Metode Perhitungan Analisis Pengeluaran

1. Analisis Varians Pengeluaran

Menganalisis variasi atau disparitas antara anggaran dan belanja aktual dikenal dengan istilah analisis varians pengeluaran. Meskipun sederhana, analisis varians dapat menghasilkan informasi yang sangat berharga. Besarnya ketidaksesuaian belanja anggaran dengan kenyataannya, yang dapat dinyatakan dalam persentase atau nilai nominal, dapat dengan mudah diketahui oleh pembaca laporan berdasarkan Laporan Realitas Anggaran yang disediakan. Nilai nominal dan ukuran persentase adalah dua cara untuk menyajikan temuan analisis. Kesenjangan anggaran dapat dibagi menjadi dua kategori:

- a. *Favourable Variance* (Selisih Disukai) yaitu varians yang menguntungkan terjadi ketika pengeluaran aktual lebih kecil dari anggaran, dan
- b. *Unfavourable Variance* (Selisih Tidak Disukai) yaitu varians yang tidak menguntungkan terjadi ketika pengeluaran aktual melebihi anggaran.

Ketika memeriksa indikator pendapatan, konsumen laporan dapat memperoleh manfaat besar dari informasi perbedaan anggaran ini (Mahmudi 2016:155). Rumus untuk menghitung analisis varians pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Varians Blnj} = \text{Anggrn Blnj} - \text{Realisasi Blnj}$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Varians Pengeluaran

Kriteria Penilaian Pengeluaran	Ukuran
Baik	Realisasi Anggaran Belanja ≤ Anggaran Pengeluaran
Kurang baik	Realisasi Anggaran Belanja > Anggaran Pengeluaran

Sumber: Mahmudi, 2010

2. Analisis Kecerassian Pengeluaran

Menemukan keseimbangan antar pengeluaran dapat dilakukan dengan bantuan analisis kesesuaian pengeluaran. Fungsi anggaran sebagai fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi terkait dengan hal tersebut. Pemerintah daerah harus mengkoordinasikan pengeluaran jika ingin anggaran berfungsi dengan baik. Proporsi pengeluaran investasi yang digunakan untuk membangun infrastruktur perekonomian masyarakat menurun seiring dengan meningkatnya jumlah uang tunai yang dialokasikan untuk belanja rutin. Baik rasio pengeluaran modal terhadap total pengeluaran maupun analisis pengeluaran operasional terhadap total pengeluaran akan dihitung dalam penelitian ini.

- a. Analisis Pengeluaran Operasional Terkait dengan Total Pengeluaran
 Analisis Pengeluaran Operasional Terkait Total Pengeluaran adalah proses membandingkan pengeluaran operasional aktual dengan total pengeluaran daerah. Karena manfaatnya berakhir dalam satu tahun fiskal, pengeluaran operasional bersifat jangka pendek dan, dalam kasus tertentu, bersifat umum dan berulang. Rumus penentuan analisis biaya operasional terhadap total biaya adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

- b. Pengeluaran Modal Dibandingkan dengan Total Pengeluaran

Membandingkan total realisasi pengeluaran modal dengan pengeluaran daerah secara keseluruhan dikenal dengan analisis pengeluaran modal terhadap total pengeluaran. Selain bersifat rutin, pengeluaran modal juga menawarkan manfaat jangka menengah dan panjang. Menurut Mahmudi (2016), pengeluaran modal biasanya mencapai 5–20% dari total pengeluaran. Rumus penghitungan analisis pengeluaran modal terhadap total pengeluaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Blnj Mdl} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Desa}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Penilaian Kecerassian Pengeluaran

Analisis Kecerassian Pengeluaran	Rasio Kecerassian Pengeluaran (%)
Tidak Serasi	00-20
Kurang Serasi	20-40
Cukup Serasi	40-60
Serasi	60-80
Sangat Serasi	80-100

Sumber: Mahmudi, 2010

3. Analisis Efisiensi Pengeluaran

Perbandingan pengeluaran aktual dan yang dianggarkan menghasilkan kajian efisiensi pengeluaran (Kawatu, 2019). Kajian ini dapat digunakan untuk mengukur besarnya penghematan anggaran pemerintah. Tidak ada kriteria yang dianggap cocok untuk analisis ini, sehingga angka yang diperoleh bersifat relatif. Pemerintah daerah berhasil melakukan efisiensi anggaran jika persentase hasilnya kurang dari 100%; jika persentase hasilnya lebih besar dari 100% maka dianggap pemborosan anggaran. Mahmudi (2016) menyatakan bahwa rumus berikut dapat digunakan untuk menghitung analisis efisiensi pengeluaran:

Tabel 3. Kriteria Rasio Efisiensi Pengeluaran

Analisis Rasio Efisiensi Pengeluaran	Rasio Efisiensi Pengeluaran (%)
Tidak Efisien	>100%
Kurang Efisien	90% - 100%
Cukup Efisien	80% – 90%
Efisien	60% - 80%
Sangat Efisien	< 60%

Sumber: Keppmendagri No. 690.900.327, 1996

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa Haruru untuk periode 2020-2023 dengan teknik analisis sebagai berikut:

- a. Analisis Varians Pengeluaran
- b. Analisis Keserasian Pengeluaran
 1. Analisis pengeluaran operasi terhadap total pengeluaran
 2. Analisis pengeluaran modal terhadap total pengeluaran
- c. Analisis Efisiensi Pengeluaran

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Varian Pengeluaran

Berdasarkan hasil perhitungan analisis varians Pemerintah Desa Haruru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Analisis Varians Pengeluaran

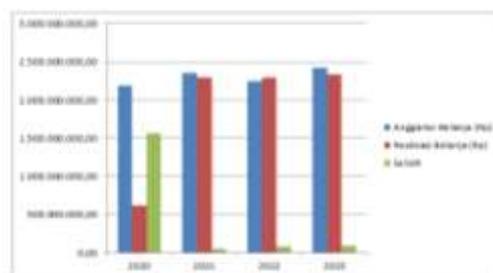
Tahun	Analisis Varians Pengeluaran (Rp.)	Kriteria
2020	1.568.777.386,00	Baik
2021	56.218.176,00	Baik
2022	85.633.381,00	Baik
2023	91.012.885,00	Baik
Rata-Rata	1.801.641.828,00	Baik

Sumber : Data Olahan, 2024

Mengingat realisasi tahun 2020–2023 lebih kecil dari anggarannya, maka dari temuan analisis varians pengeluaran yang dilakukan terhadap pengeluaran pada Pemerintah Desa Haruru dapat disimpulkan bahwa varians pengeluaran pada tahun 2020–2023 dikategorikan baik dengan perbedaan kinerja yang menguntungkan (*favourable variance*).

$$\text{Efisiensi Pengeluaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Gambar 1. Grafik Ukuran Varians Pengeluaran Tahun 2020-2023



Sumber: Data olahan, 2024

Gambar di atas menggambarkan perubahan tingkat varians pengeluaran Pemerintah Desa Haruru pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 bahwa rata-rata anggaran pengeluaran adalah sebesar Rp. 9.212.869.768,00 dan realisasi pengeluaran adalah sebesar Rp. 7.411.227.940,00 dan selisih sebesar Rp. 1.801.641.828,00 dengan kinerja kategori Selisih Disukai (*favourable Variance*). Diketahui tahun 2020 selisih sebesar Rp. 1.568.777.386,00 dan tahun 2021 selisih sebesar Rp. 56.218.176,00 dan tahun 2022 selisih sebesar Rp. 85.633.381,00 serta tahun 2023 selisih sebesar Rp. 91.012.885,00. Karena pengeluaran aktual tidak melampaui jumlah yang diproyeksikan, maka pengeluaran tersebut tergolong positif dan termasuk dalam kategori varians yang menguntungkan pada tahun 2020–2023. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Haruru telah melakukan pengurangan pengeluaran tanpa melebihi anggaran yang telah dialokasikan. Sebaliknya, jika kesenjangan anggaran cukup besar, maka dianggap bahwa program kerja yang tidak terealisasi adalah penyebab rendahnya pemanfaatan uang.

b. Analisis Keserasian Pengeluaran

1. Analisis Pengeluaran Operasi Terhadap Total Pengeluaran

Berdasarkan hasil perhitungan analisis pengeluaran operasi terhadap total pengeluaran seluruh kegiatan Pemerintah Desa Haruru tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Presentase Pengeluaran Operasi

Tahun	Presentase Pengeluaran Operasi (%)	Kriteria Rasio Pengeluaran
2020	60,4	Serasi
2021	40,3	Cukup serasi
2022	55,7	Cukup serasi
2023	70,9	Serasi
Rata-rata	56,8	Cukup Serasi

Sumber : Data Olahan, 2024



Gambar 2. Grafik Ukuran Pengeluaran Operasi Tahun 2020-2023

Sumber : Data olahan, 2024

Grafik diatas menunjukkan perubahan tingkat pengeluaran operasi pada Pemerintah Desa Haruru tahun 2020-2023. Tingkat presentase pengeluaran operasi pada tahun 2020 adalah sebesar 60,4% kategori serasi, tahun 2021 adalah sebesar 40,3% termasuk kategori cukup serasi, tahun 2022 adalah sebesar 55,7% termasuk kategori cukup serasi, dan tahun 2023 tingkat presentase pengeluaran adalah sebesar 70,9% termasuk kategori serasi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional, khususnya yang berkaitan dengan pegawai serta barang dan jasa, menghabiskan hampir seluruh anggaran pengeluaran.

2. Analisis Pengeluaran Modal Terhadap Total Pengeluaran

Analisis pengeluaran modal terhadap total pengeluaran seluruh kegiatan Pemerintah Desa Haruru tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6

Pengeluaran Modal Terhadap Total Pengeluaran

Tahun	Presentase Pengeluaran Modal (%)	Kriteria Rasio Pengeluaran
2020	34,7	Kurang serasi
2021	8,4	Tidak serasi
2022	14,1	Tidak serasi
2023	11,7	Tidak serasi
Rata-rata	17,2	Tidak serasi

Sumber: Data olahan, 2024

Analisis penulis tentang pengeluaran modal terhadap total pengeluaran yang dilakukan terhadap pengeluaran Pemerintah Desa Haruru menghasilkan

kesimpulan bahwa pada tahun 2020 hingga tahun 2023, rasio pengeluaran modal pada tahun 2020 mewakili 34,7% dari hasil perhitungan. Rasio pengeluaran modal dapat dikategorikan kurang harmonis karena saat ini berada pada angka 20–40% dan akan turun sebesar 0–20% pada tahun 2021–2023, ketika rasio tersebut berada pada jumlah yang tidak proporsional.

Grafik 3. Ukuran Pengeluaran Modal Tahun 2020-2023



Sumber : Data olahan tahun, 2024

Grafik diatas menunjukkan perubahan tingkat pengeluaran modal pada Pemerintah Desa Haruru tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Tingkat presentase pengeluaran modal pada tahun 2020 adalah sebesar 34,7%, tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan sebesar 8,4% disebabkan oleh pendapatan yang rendah terhadap Pemerintah Desa Haruru karena refocusing covid-19, tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 14,1%, dan tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 11,7% dengan presentase tidak serasi. Seperti terlihat pada tabel 4.3 dan 4.4, pengeluaran operasional relatif rendah selama tahun 2020–2023, dengan sebagian besar dana yang dialokasikan dari total pengeluaran digunakan untuk pengeluaran operasional dibandingkan pengeluaran modal. Rata-rata biaya operasional tahun 2020 hingga 2023 sebesar 56,8%, sedangkan rata-rata pengeluaran modal sebesar 17,2%. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran modal jauh lebih rendah dibandingkan proporsi pengeluaran operasional karena sebagian besar pengeluaran modal tidak dialokasikan untuk pembelian gedung dan bangunan.

Mayoritas dana yang dialokasikan dari total pengeluaran lebih besar untuk pengeluaran operasional dibandingkan pengeluaran modal, menurut analisis kesesuaian belanja tahun 2020–2023. Akibatnya, analisis pengeluaran operasional relatif lebih besar dibandingkan analisis pengeluaran modal. Secara umum seluruh komponen pengeluaran mempunyai kinerja yang baik, namun

dana yang diterima diharapkan dapat digunakan seefisien mungkin.

c. Analisis Efisiensi Pengeluaran

Hasil perhitungan analisis efisiensi pengeluaran Pemerintah Desa Haruru tahun 2020 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

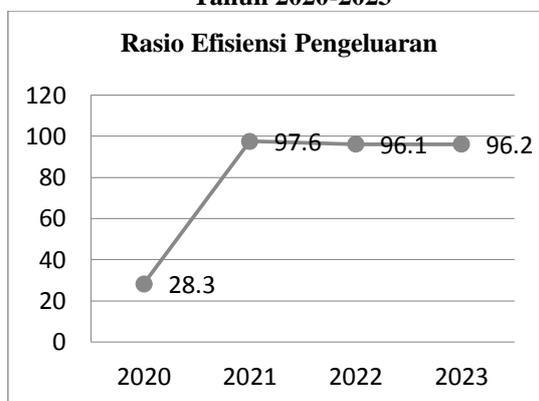
Tabel 7. Efisiensi Pengeluaran

Tahun	Presentase Efisiensi Pengeluaran (%)	Kinerja
2020	28,3	Sangat Efisien
2021	97,6	Kurang Efisien
2022	96,1	Kurang Efisien
2023	96,2	Kurang Efisien
Rata-rata	79,5	Efisien

Sumber: Data olahan tahun, 2024

Bagan di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Haruru mempunyai sistem pengelolaan pengeluaran yang efisien. Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Haruru berkompeten melakukan efisiensi pengeluaran pada tahun 2020 hingga 2023 karena proporsi tahun 2020–2023 masih di bawah 100%.

Gambar 4. Ukuran Efisiensi Pengeluaran Tahun 2020-2023



Sumber: Data olahan, 2024

Grafik diatas menunjukkan perubahan tingkat efisiensi pengeluaran pada Pemerintah Desa Haruru dari tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Tingkat presentase efisiensi pengeluaran pada tahun 2020 adalah sebesar 28,3%, tahun 2021 adalah sebesar 97,6%, tahun 2022 adalah sebesar 96,1% dan tahun 2023 adalah sebesar 96,2%. Analisis efisiensi pengeluaran paling rendah adalah pada tahun 2020 hal ini disebabkan karena tidak terlalu besar pengeluaran modal sehingga jumlah realisasi pengeluaran pada tahun 2020 cukup rendah. Ini berarti tahun 2020-2023 Pemerintah Desa Haruru

mengalami refocusing anggaran yang dilakukan untuk keperluan pelaksanaan penanganan COVID-19 tetapi kinerja dikatakan efisien.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan tentang analisis pengeluaran dalam Laporan Realisasi Belanja Pemerintah Desa Haruru tahun 2020-2023 dikatakan baik dimana mengukur analisis pengeluarannya menggunakan analisis varians pengeluaran, analisis keserasian pengeluaran dan analisis efesiensi pengeluaran. Maka disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis varians pengeluaran pada Pemerintah Desa Haruru pada tahun 2020 – 2023 rata-rata selisih sebesar Rp. 1.801.641.828,00 menunjukkan kinerja yang baik dan masuk dalam kategori selisih disukai (*favourable varians*), artinya realisasi pengeluaran tidak melebihi anggaran yang ditetapkan.
2. Berdasarkan analisis keserasian Pemerintah Desa Haruru, hanya sebagian kecil dana pengeluaran yang disisihkan untuk proyek modal; sebagian besar digunakan untuk biaya operasional. Selama tahun 2020-2023 rata-rata pengeluaran operasi sebesar 56,8% sedangkan pengeluaran modal sebesar 17,2%. Dari analisis pengeluaran Pemerintah Desa Haruru dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan keserasian pengeluaran, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan pengeluaran operasional dibandingkan pengeluaran modal.
3. Berdasarkan analisis efisiensi pengeluaran Pemerintah Desa Haruru, realisasi anggaran pengeluaran tidak melebihi anggaran pengeluaran yang diproyeksikan. Fakta bahwa tidak ada persentase yang melampaui 100% antara tahun 2020 dan 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Haruru telah melakukan efisiensi pengeluaran.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peniliti memberikan saran bagi Pemerintah Desa Haruru, agar dapat menyusun anggaran pengeluaran dengan memperhatikan kondisi dengan harapan anggaran tersebut dapat terealisasi dengan baik. Selain itu, sebaiknya Pemerintah Desa Haruru tetap meningkatkan realisasi pengeluaran dalam hal pengeluaran modal dan pengeluaran operasional karena berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa presentase pengeluaran modal jauh dibawah pengeluaran operasi dan mengefisiensi pengeluaran agar kinerja dikatakan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul dan Iqbal, Muhammad. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi 4, Cetakan 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Afif, Naufal Lu'alfian. 2020. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dinoyo Tahun Anggaran 2020*. Universitas 17 Agustus 1945.
- Amelia, Panca Safira, dkk. 2023. *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019-2021*. Jurnal Maneksi, P3M Politeknik Negeri Ambon. Vol 12 (2), pp. 308-313.
- Deviyanti, Dwi Risma, dkk. 2023. *Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Gemar Baru Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman. Vol 8 (1).
- Fatmaningsih, Lusiana, pardi pardi. 2021. *Analisis Belanja Desa Terhadap Pendapatan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid -19 (Studi Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar)*. E-Jurnal Akuntansi dan Pajak. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta Indonesia. Vol 22 (1).
- Hidayah, Nur Kholifatul. 2018. *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Sambilawang Periode 2015 – 2017*. Falkutas Ekonomi Universitas Islam Majapahit Mojokerto.
- Kawatu, F. S. (2019). *Analisa Laporan Keuangan Sektor Publik*. Cetalan pertama. Yogyakarta : Deepublish.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Masrudiyanto, Dkk. 2017. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bebetin Kecamatan Sawan*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali. Vol 7 (1).
- Nafarin. M. 2018. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga, Cetakan kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2, Jakarta : Salemba Empat.
- Pangkey, Imanuel dan Sherly Pinatik. 2016. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Parawisata Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Emba Vol 3 (4).
- Permatasari, Mega. 2018. *Analisis Efisiensi Anggaran Belanja Pada Desa Melati 2 Perbaungan*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara. Skripsi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rahmawati, Risna. 2016. *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Dinas Perekonomian Dan Pariwisata Kabupaten Tuban (Rangkuman Tugas Akhir)*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Rudianto. 2009. *Penganggaran: Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, Adam. 2021. *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Terhadap Pembangunan Desa di Desa Parbuluan Kabupaten Dairi*. Universitas Medan Area.
- Tuerah, Aurelia dan Hendrik Manossoh. 2022. *Proses Penyusunan dan Pengukuran Efisiensi Anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Bitung Provinsi*. Falkutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKun Vol. 5 (02).
- Suhaedi, Wirawan. 2019. *Analisis Belanja Daerah*. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma, FEB Universitas Mataram. Vol 18 (2), pp. 63-78.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.